

**STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI
MELALUI PENATAAN KELEMBAGAAN
DAN INDUSTRI KARET ALAM DI PROPINSI RIAU**
*Strategy of Economic Development Acceleration through Institutional Arrangement
and Industry of Natural Rubber in the Province of Riau*

Oleh: **Almasdi Syahza, Djaimi Bakce, dan Nur Hamlin**
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Riau

Email: syahza.almasdi@gmail.com Blog: <http://almasdi.staff.unri.ac.id>

Abstrak

Perkembangan sektor pertanian khususnya komoditi kelapa sawit di Daerah Riau telah menggeser usahatani komoditi karet alam. Perkebunan karet di Riau masih di kelola secara tradisional. Pengelolaannya dilakukan secara sederhana. Tingkat produktivitasnya rendah, yaitu sekitar 738 kg/ha/tahun. Kurangnya perawatan menyebabkan kualitas hasil bahan olah karet (Bokar) juga tergolong rendah. Budaya bokar kotor masih mendominasi perilaku petani karet dalam memproduksi bokar. Harga karet di tingkat petani sangat ditentukan oleh toke-toke desa. Petani karet tidak mempunyai kekuatan tawar menawar. Tujuan penelitian adalah menemukan model dan strategi penataan kelembagaan, tataniaga karet, pembangunan industri karet alam dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi berkelanjutan di pedesaan. Strategi yang dimaksud bertujuan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi sehingga upaya percepatan pembangunan ekonomi masyarakat dapat ditingkatkan. Jenis Penelitian adalah eksploratif yang bertujuan untuk menyelidiki pola dan perurutan pertumbuhan atau perubahan dalam menyusun strategi kebijakan. Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui survey dengan metode perkembangan (*Developmental Research*). Daya dukung wilayah (DDW) usahatani karet alam sebesar 1,53. Artinya bahan baku yang tersedia melebihi kapasitas olah industri. Kondisi tersebut akan berdampak terhadap penekakan harga dari sisi permintaan (industri). Guna meningkatkan harga dari sisi petani, maka perlu ditambah industri pengolah, sehingga kekuatan tawar petani di pedesaan bisa meningkat. Angka *multiplier effect* ekonomi di daerah pengembangan karet pada tahun 2014 sebesar 0,65. Tahun 2010 indek *multiplier effect* ekonomi di daerah sentra produksi karet 1,83. Menurunnya indek *multiplier effect* ekonomi memberikan gambaran bahwa usahatani karet menunjukkan perlambatan dibandingkan periode sebelumnya. Hal tersebut lebih disebabkan masyarakat pedesaan mulai bergeser usahatannya kekomoditi lain yakni kelapa sawit.

Kata kunci: karet alam, dww, *multiplier effect*

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu mencerminkan distribusi pendapatan yang adil dan merata, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini hanya dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat, seperti masyarakat perkotaan, sedangkan masyarakat pedesaan atau pinggiran mendapat porsi yang kecil dan tertinggal. Kesenjangan di daerah ini semakin diperburuk karena adanya kesenjangan dalam pembangunan antar sektor, terutama antara sektor pertanian (basis ekonomi pedesaan) dan non-pertanian (ekonomi perkotaan).

Perkembangan sektor pertanian khususnya komoditi kelapa sawit telah menyebabkan ketimbangan pendapatan antara daerah dan antar petani terutama dengan petani karet dan kelapa. Komoditi kelapa sawit mempunyai potensi pasar yang terjamin, dari sisi lain petani karet menghadapi pasar monopsoni. Harga karet di tingkat petani sangat ditentukan oleh toke-toke desa. Petani karet tidak mempunyai kekuatan tawar menawar. Dari sisi lain pabrik karet alam di Daerah Riau sangat terbatas dan tidak mampu menampung produksi karet rakyat.

Dampak sari semuanya itu terhadap perkembangan karet alam mengalami penurunan begitu juga dari sisi harga. Berdasarkan data dari Dinas Perkebunan Propinsi Riau (2013), terjadi alih fungsi lahan dari perkebunan karet menjadi perkebunan kelapa sawit. Bahkan peralihan ini juga terjadi di daerah yang kemiringannya di atas 15%. Kebun karet pada tahun 2000 seluas 547.453 ha dan pada tahun 2014 turun menjadi 505.264 ha begitu juga terjadi pada perkebunan kelapa, yakni tahun 2000 seluas 586.418 ha dan turun menjadi 520.948 ha pada tahun 2014. Sementara perkebunan kelapa sawit berkembang dengan pesatnya yaitu pada tahun 2000 seluas 966.786 ha menjadi 2.399.171 ha pada tahun 2014.

Permasalahan yang dihadapi oleh petani karet alam di Daerah Riau adalah ketidakpastian harga, rendahnya harga ditingkat petani yang berdampak pada pendapatan keluarga. Yang tak kalah pentingnya, petani karet alam menghadapi kondisi pasar yang monopsoni, tidak adanya lembaga ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan petani di pedesaan karena harga karet dikuasai oleh toke-toke (semacam rentenir di pedesaan).

Dari apa yang telah diungkapkan, maka pada rencana penelitian ini penulis mengajukan beberapa rumusan masalah sebagai titik awal untuk penelitian, yaitu: 1) Seberapa besar daya dukung wilayah (DDW) terhadap pengembangan industri karet alam di daerah Riau? 2) Bagaimana strategi penataan kelembagaan usahatani karet dalam upaya memacu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi wilayah?

Daya dukung wilayah adalah kemampuan wilayah dalam menyediakan bahan baku industri yang ada di kawasan wilayah itu sendiri. Konsep daya dukung wilayah paling mudah diterapkan pada sistem agraris. Dalam sistem itu industri yang berbasis agraris kesinambungan kegiatannya tertumpu pada pertanian dalam arti luas. Pengukuran daya dukung wilayah didasarkan pada kemampuan lahan (*land capability*). Pada umumnya kemampuan lahan dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan lahan dalam fungsinya sebagai media tumbuh untuk mencapai tingkat produksi tertentu. Dalam keadaan ini yang ditinjau adalah daya dukung wilayah terhadap pengembangan industri hilir yang berbasis kelapa sawit (Mustari. K. dan Mapangaja B, 2005).

Keutamaan penelitian ini adalah menemukan model dan strategi penataan kelembagaan, tataniaga karet, pembangunan industri karet alam dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi berkelanjutan di pedesaan. Strategi yang dimaksud bertujuan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi sehingga upaya percepatan pembangunan ekonomi masyarakat dapat ditingkatkan.

Hasil penelitian berguna bagi pelaku agribisnis dan pemerintah sebagai pengambil keputusan sehubungan dengan usaha pengembangan perkebunan. Diharapkan adanya perbaikan yang berakibat meningkatkan pendapatan petani karet sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah penelitian ini dilakukan dapat memberikan rumusan strategis untuk memanfaatkan sumberdaya lokal melalui pembangunan perkebunan dan industri karet alam dalam upaya percepatan pembangunan yang berkelanjutan.

Hasil penelitian Almasdi Syahza (2013), pembangunan perkebunan di daerah Riau membawa dampak ganda terhadap ekonomi wilayah, terutama sekali dalam menciptakan kesempatan dan peluang kerja. Pembangunan ini telah memberikan tetesan manfaat (*trickle down effect*), sehingga dapat memperluas daya penyebaran (*power of dispersion*) pada masyarakat sekitarnya. Semakin besar perkembangannya, semakin terasa dampaknya terhadap tenaga kerja yang bekerja pada sektor perkebunan dan turunannya. Dampak tersebut dapat dilihat dari peningkatan pendapatan masyarakat petani, sehingga meningkatnya daya beli masyarakat pedesaan, baik untuk kebutuhan primer maupun sekunder.

Dampak terhadap masyarakat sekitar pengembangan perkebunan, tercermin dalam terciptanya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat tempatan, seperti membuka kios makanan dan minuman, jasa transportasi, industri rumah tangga, serta jasa perbankan. Semuanya ini akhirnya menimbulkan munculnya pasar-pasar tradisional di daerah permukiman dan pedesaan. Dengan demikian pendapatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Dari sisi lain menyebabkan pola konsumsi dan pendidikan masyarakat akan meningkat pula (Almasdi Syahza, 2007a).

Aktivitas pembangunan perkebunan yang melibatkan banyak tenaga kerja dan investasi yang relatif besar untuk industri hilirnya, diperkirakan secara positif merangsang, menumbuhkan dan menciptakan lapangan kerja serta lapangan berusaha. Melalui kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan selama proses kegiatan pembangunan perkebunan dan pembangunan industri hilirnya akan mempunyai keterkaitan ke belakang (*backward linkages*). Pada proses kegiatan ini diperkirakan akan muncul antara lain jasa konstruksi, jasa buruh tani, jasa angkutan, perdagangan pangan dan sandang,

perdagangan peralatan kerja serta bahan dan material yang dibutuhkan selama proses tersebut. Sedangkan pada kegiatan pasca panen dan proses produksi akan mempunyai keterkaitan ke depan (*forward linkages*). Proses *forward linkages* yang diperkirakan akan muncul adalah sektor jasa, antara lain angkutan, perhotelan, koperasi, perbankan, dan perdagangan (Almasdi Syahza, 2007b).

Pengembangan perkebunan di pedesaan telah membuka peluang kerja bagi masyarakat yang mampu untuk menerima peluang tersebut. Dengan adanya perusahaan perkebunan, mata pencaharian masyarakat tempatan tidak lagi terbatas pada sektor primer, tetapi telah memperluas ruang gerak usahanya pada sektor tertier. Berbagai sumber pendapatan yang memberikan andil yaitu pedagang (dagang barang-barang harian, dagang karet, tiket angkutan dan penjual es), pegawai (guru, pemerintahan desa), industri rumah tangga (industri tahu, roti, dan percetakan genteng), buruh kasar, nelayan, pencari kayu di hutan dan tukang kayu (Almasdi Syahza, 2009).

Selama ini yang dihadapi di Daerah Riau adalah perkembangan perkebunan kelapa sawit, menyebabkan daerah-daerah sekitar pembangunan perkebunan muncul pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Namun di wilayah pengembangan komoditi karet justru daerahnya mengalami kemunduran ekonomi. Kondisi ini menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat pedesaan, terutama terhadap kebutuhan rutin rumah tangga dan kebutuhan sarana produksi perkebunan. Akibatnya rendahnya permintaan dan mobilitas barang dan orang menurun. Daerah pengembangan komoditi karet justru tertinggal dibandingkan dengan daerah yang menghasilkan kelapa sawit.

Akhir dari penelitian ini akan menghasilkan bentuk penataan kelembagaan usahatani perkebunan mulai dari hulu ke hilir. Hasil penelitian penataan kelembagaan tersebut diharapkan mampu merumuskan suatu model yang dapat menciptakan nilai tambah bagi pelaku usaha perkebunan dan mampu menghasilkan produk turunan yang mempunyai nilai ekonomi. Pembangunan perkebunan kedepan tidak lagi semata memacu nilai tambah saja, tapi mampu menciptakan pembangunan perkebunan yang berkelanjutan.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian Strategi Percepatan Pembangunan Ekonomi Melalui Penataan Kelembagaan dan Industri Karet Alam di Propinsi Riau adalah penelitian eksploratif yang bertujuan untuk menyelidiki pola dan perurutan pertumbuhan atau perubahan dalam

menyusun strategi kebijakan. Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui survey dengan metode perkembangan (*Developmental Research*).

Lokasi penelitian dilakukan di daerah Daerah Riau wilayah daratan yakni Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, dan Kuantan Singingi. Ketiga kabupaten tersebut mempunyai produktifitas berbeda yang disebabkan perbedaan tingkat kesuburan tanah.

Data yang diperlukan adalah data primer dan sekunder. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait maupun dari pengusaha industri karet alam. Informasi yang diperlukan berupa kebijakan oleh pemerintah daerah dan perusahaan perkebunan. Data primer dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun berdasarkan kebutuhan penelitian. Untuk mendapatkan informasi yang akurat dilakukan dengan metode *Rapid Rural Appraisal* (RRA), yaitu suatu pendekatan partisipatif untuk mendapatkan data/informasi dan penilaian (*assesment*) secara umum di lapangan dalam waktu yang relatif pendek. Dalam metode RRA ini informasi yang dikumpulkan terbatas pada informasi dan yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan penelitian, namun dilakukan dengan lebih mendalam dengan menelusuri sumber informasi sehingga didapatkan informasi yang lengkap tentang sesuatu hal.

Untuk mengurangi penyimpangan (bias) yang disebabkan oleh unsur subjektif peneliti maka setiap kali selesai melakukan interview dengan responden dilakukan analisis pendahuluan. Kalau ditemui kekeliruan data dari yang diharapkan karena disebabkan oleh adanya informasi yang keliru atau salah interpretasi maka dilakukan konfirmasi terhadap sumber informasi atau dicari informasi tambahan sehingga didapatkan informasi yang lebih lengkap.

Untuk mendapat hasil penelitian percepatan ekonomi daerah melalui penataan kelembagaan dan tataniaga karet alam, maka perlu dilakukan beberapa analisis, antara lain: 1) Kemampuan daya dukung wilayah (DDW) industri karet alam; 2) Potensi pengembangan industri karet alam di daerah yang berpotensi untuk meningkatkan daya saing petani; 3) Prediksi *multiplier effect* ekonomi dan potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat petani karet alam; 4) Kesempatan peluang kerja dan usaha di daerah kajian; 5) Analisis strategi penataan kelembagaan dan tataniaga usahatani karet alam; 6) Terjaringnya sentra produksi dan kawasan pembangunan industri karet alam di daerah berpotensi.

Setelah kajian ini dilakukan diharapkan ditemukan Strategi Percepatan Pembangunan Ekonomi Melalui Penataan Kelembagaan dan Industri Karet Alam guna percepatan peningkatan ekonomi masyarakat di daerah Riau.

Hasil dan Pembahasan

Perkembangan Komoditi Karet Alam di Riau

Komoditas karet merupakan salah satu komoditas andalan ekspor Indonesia. Demikian juga halnya di Provinsi Riau, perusahaan komoditas karet merupakan salah satu mata pencaharian pokok andalan masyarakat. Secara umum, komoditas ini berkontribusi penting sebagai sumber devisa negara, bahan baku industri, dan pendapatan masyarakat.

Sampai saat ini, komoditas karet masih merupakan salah satu komoditas yang potensial untuk terus dikembangkan. Namun demikian dalam perkembangannya dihadapkan pada tiga permasalahan utama, yaitu: *Pertama*, produktivitas karet yang rendah dan cenderung mengalami penurunan. Hal ini disebabkan tanaman karet unggul yang dikembangkan melalui berbagai proyek pemerintah di Provinsi Riau sudah memasuki usia tua atau tidak produktif lagi. Disisi lain peremajaan yang dilakukan petani secara mandiri pada umumnya menggunakan bibit tidak unggul. *Kedua*, harga karet yang relatif rendah dan berfluktuasi. Harga karet yang berfluktuasi dan cenderung rendah menyebabkan motivasi petani untuk secara konsisten menekuni usahatani karet cenderung melemah. Struktur pasar karet yang cenderung oligopsoni, menyebabkan petani karet senantiasa berada pada *bargaining position* yang lemah. *Ketiga*, alih fungsi lahan karet ke kelapa sawit terjadi cukup massif baik pada lahan karet milik petani maupun perusahaan besar. Ketiga kondisi tersebut menyebabkan produksi karet di Provinsi Riau terus menurun.

Jika diamati perkembangan luas lahan komoditas karet selama periode 2005-2013 terjadi pertumbuhan yang cukup pesat. Yakni di Propinsi Riau perkembangan luas lahan kebun karet terlihat dari pertumbuhan sebesar 20,62% pertahun. Perkembangan ini terjadi di beberapa daerah kabupaten terutama di Kabupaten Kepulauan Meranti. Dibeberapa daerah antara lain Kabupaten Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, Bengkalis, Rokan Hilir dan Siak justru mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan terjadinya alih fungsi lahan dari kebun karet ke kebun kelapa sawit. Walaupun terjadi perluasan perkebunan karet di Riau, namun dari sisi produksi mengalami penurunan, hal tersebut disebabkan masih banyaknya tanaman yang belum menghasilkan. Perkembangan perkebunan karet dan produksi disajikan pada Tabel 1.

Dalam rangka untuk mempertahankan dan meningkatkan eksistensi perkebunan karet di Provinsi Riau sebagai sumber devisa dan peningkatan kesejahteraan rakyat maka berbagai upaya dari aspek sistem produksi perlu dilakukan. Di Provinsi Riau, ada dua pola pengembangan sistem produksi karet alam, yaitu: pola peremajaan, dan pola perluasan tanaman.

Peremajaan adalah upaya pengembangan perkebunan dengan melakukan penggantian tanaman karet yang sudah tidak produktif (tua/rusak) dengan tanaman karet baru secara keseluruhan dan menerapkan inovasi teknologi. Sementara itu, pola perluasan yang dimaksudkan adalah upaya pengembangan areal tanaman perkebunan karet pada wilayah bukaan baru atau pengukuhan areal di sekitar perkebunan yang sudah ada dengan menggunakan inovasi teknologi.

Tabel 1. Perkembangan Luas Areal dan Produksi Karet Alam di Propinsi Riau

<i>Kabupaten</i>	2005		2013		Pertumbuhan	
	Luas	Produksi	Luas	Produksi	Luas	Produksi
1 Kampar	83.868	39.111	92.537	60.714	1,24	5,65
2 Rokan Hulu	55.798	40.675	56.039	54.394	0,05	3,70
3 Pelalawan	23.048	18.100	25.856	34.137	1,45	8,25
4 Indragiri Hulu	71.989	38.571	58.627	40.468	-2,53	0,60
5 Kuantan Singingi	158.774	137.809	146.474	71.149	-1,00	-7,93
6 Bengkalis	51.304	52.678	35.000	16.934	-4,67	-13,23
7 Rokan Hilir	36.678	11.135	26.390	24.714	-4,03	10,48
8 Dumai	1.463	845	2.355	1.524	6,13	7,65
9 Siak	16.191	9.276	16.129	7.039	-0,05	-3,39
10 Indragiri Hilir	2.752	1.069	5.369	3.552	8,71	16,19
11 Pekanbaru	-	-	2.926	588	0,00	0,00
12 Kepulauan Meranti	-	-	19.110	9.438	0,00	0,00
Rakyat	112.782	349.269	486.812	324.651	20,06	-0,91
PBN	-	24.975	10.901	16.949	0,00	0,00
PBS	-	22.047	7.551	12.657	0,00	0,00
Jumlah	112.782	396.291	505.264	354.257	20,62	-1,39

Berdasarkan pengamatan lapangan, perkebunan karet di Riau masih di kelola secara tradisional. Pengelolaannya dilakukan secara sederhana. Setelah bibit karet ditanam kemudian dibiarkan begitu saja tanpa perawatan yang memadai, sehingga tingkat produktivitasnya rendah, yaitu hanya sekitar 738 kg/ha/tahun. Kurangnya perawatan menyebabkan kualitas hasil bahan olah karet (Bokar) juga tergolong rendah. Budaya bokar kotor masih mendominasi perilaku petani karet dalam memproduksi bokar.

Banyak faktor yang menjadi penyebab rendahnya mutu bokar petani, antara lain: 1) jumlah produksi yang rendah karena lahan sempit; 2) bibit karet tidak unggul; 3) pemeliharaan kebun yang asal-asalan; dan 4) teknik penyadapan yang tidak tepat. Faktor lain yang ikut mempengaruhi buruknya mutu bokar adalah panjangnya rantai pemasaran dari petani karet hingga pabrik pengolahan. Konsekuensinya petani karet cenderung memperberat

timbang bokarnya dengan cara memasukkan bahan pengotor kedalam bokarnya seperti kayu, dedaunan, tanah dan bahan pemberat lainnya dengan harapan petani memperoleh hasil penimbangan yang lebih, sekalipun harganya rendah. Di sisi lain tingkat pengetahuan petani karet yang rendah tentang teknik penyadapan yang benar, penggunaan bahan penggumpal atau pembeku yang sesuai serta penanganan pasca panen bokar ikut mempengaruhi rendahnya mutu bokar yang dihasilkan petani karet.

Rendahya posisi tawar (*bargaining position*) petani karet dengan pedagang ikut membantu rendahnya harga karet yang diterima oleh petani. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh lemahnya kelembagaan petani karet. Bukti empiris dari lemahnya kelembagaan petani tersebut dapat dilihat masih sedikitnya petani karet yang tergabung dalam kelompok tani atau kelompok usaha bersama (KUB). Jumlah petani karet pada tahun 2011 sebanyak 244.317 KK mengalami peningkatan sebesar 0,06% pada tahun 2013 menjadi 245.460 KK. Kondisi tersebut lebih disebabkan sebagian masyarakat tertarik mengembangkan komoditas kelapa sawit. Bahkan di daerah yang tingkat kemiringan lahan di atas 15% masyarakat tetap mengusahan tanaman kelapa sawit.

Perkebunan karet masih dikelola secara tradisional dengan tingkat keahlian yang masih bersifat turun temurun. Belum memanfaatkan teknologi dan bibit unggul, akibatnya produktivitas lahan jadi rendah. Berdasarkan pengamatan di lapangan terkait dengan kelembagaan petani karet di pedesaan, belum ada satu kelompokpun yang sudah teregistrasi sebagai Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Kementerian Pertanian No. 38 Tahun 2008. Pembentukan UPPB oleh petani karet memberikan peluang kepada petani karet untuk memasarkan bokar secara langsung ke pabrik pengolahan karet (industri crumb rubber) tanpa melalui pedagang pengumpul, sehingga petani dapat menikmati harga karet minimal 75% dari harga penjualan karet di atas pelabuhan ekspor atau *Free on Board* (FOB).

Sebagai konsekuensi dari belum terbentuknya kelompok tani atau UPPB, maka petani karet terpaksa berjuang secara sendiri-sendiri dalam memasarkan bokarnya, sehingga mau tak mau harus berhubungan dengan pedagang pengumpul yang lazim dikenal dengan sebutan tauke. Hubungan jual beli bokar antara petani karet dengan pedagang pengumpul, tidak hanya sebatas hubungan ekonomi semata, melainkan membentuk hubungan sosial budaya yang menjelma menjadi hubungan patronase (*patron klien*) antara pedagang pengumpul sebagai patron dan petani karet sebagai klien. Kelembagaan patronase tersebut pada dasarnya merupakan hubungan eksploitatif antara pedagang dengan petani karet, tetapi petani karet

tidak punya pilihan lain akibatnya taraf hidup petani karet cenderung menurun apalagi dengan harga karet alam yang makin merosot.

Permentan No. 38 tahun 2008 tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (bokar) yang telah diberlakukan sejak tujuh tahun lalu belum diberlakukan sepenuhnya. Seharusnya menjadi pedoman dalam membangun kelembagaan petani karet. Belum berlakunya Perment an tersebut menyebabkan petani karet tidak mempunyai kekuatan tawar menawar di level pedesaan. Usahatani karet belum mampu melahirkan kelembagaan petani karet yang dapat mensejahterakan petani karet. Kenyataan ini membuktikan bahwa kelembagaan pedagang karet baik berbentuk pelaku usaha maupun pedagang informal belum tertata dengan baik. Hal tersebut tentunya menyulitkan dalam melakukan pembinaan terhadap pedagang karet tersebut.

Potensi Pengembangan Industri Karet

Perkembangan usahatani karet alam di Riau tidak sepesat perkembangan komoditi kelapa sawit. Luas lahan 505.264 ha menghasilkan 354.257 ton per tahun dengan jumlah petani sebanyak 245.460 KK. Produksi karet tersebut didukung oleh 9 buah pabrik pengolahan yang tersebar di beberapa kabupaten dengan kapasitas olah 282.000 to per tahun. Perusahaan yang melakukan pengolahan karet alam dan kapasitas olah disajikan pada Tabel 2. Dari tabel tersebut, jika dibandingkan dengan kemampuan produksi dari sisi petani terdapat kesenjangan, yakni produksi petani mencapai 354.257 ton per tahun, sedangkan kapasitas olah pabrik yang ada hanya 282.000 to per tahun.

Tabel 2. Jumlah Industri Crumb Rubber Dirinci Menurut Kapasitas Pabrik Di Riau

No	Nama Pabrik	Kapasitas Produksi (Ton/Th)	Jenis Produk
1.	PT. Andalas Agro Lestari	40,000	SIR 10, SIR 20
2.	PT. P&P Bangkinang (P)	24,000	SIR 10, SIR 20
3.	PT. P&P Bangkinang (S)	24,000	
4.	PT. Hervenia Kampar Lestari	60,000	SIR 10, SIR 20
5.	PT. Perkebunan Nusantara V	25,000	RSS 1, SIR 3L, SIR 10, SIR 20
6.	PT. Riau Crumb Rubber Factory (P)	24,000	SIR 10, SIR 20
7.	PT. Riau Crumb Rubber Factory (S)	30,000	
8.	PT. Tirta Sari Surya	45,000	SIR 10, SIR 20
9.	PT. Mardec Nusa Riau	10,000	Stop operasi
	Jumlah	282,000	

Sumber: List of Member Gapkindo, 2013

Terjadinya kelebihan produksi dari sisi petani dibandingkan dengan kemampuan olah pabrik (industri) karet terpasang di Daerah Riau merupakan salah satu faktor penyebab berfluktuasinya harga karet di tingkat petani. Pada tingkat petani terjadi kelebihan penawaran bokr yang dapat menyebabkan turannya harga dari sisi permintaan. Untuk itu diperlukan analisis daya dukung wilayah (DDW) dalam penyediaan bahan baku industri karet. Hasil perhitungan perkembangan DDW disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Indikator dan Proyeksi Kekurangan Industri Karet Alam di Riau

Indikator	Kuantitas
Luas Areal (ha), tahun 2014	505.264,00
Produksi TBS (ton), tahun 2014	354.256,63
Industri pengolah sudah ada (unit)	14
Kapasitas terpasang (ton/tahun)	282.000
Kemampuan mesin (ton/tahun)	232.000
Kelebihan bahan baku (ton/tahun)	122.256,63
Daya dukung wilayah (DDW)	1,53
Kekurangan Industri (20.000 ton/tahun)	6

Sumber: Almasdi Syahza, 2015

Hasil perhitungan DDW diketahui indeksnya 1,53. Artinya kemampuan wilayah menyediakan bahan baku industri lebih besar dari 1. Bahan baku yang tersedia melebihi kapasitas olah industri. Dari sisi bahan baku besarnya DDW tidak ada masalah, karena komoditi karet bukan bahan yang cepat rusak, berbeda dengan kelapa sawit harus diolah sebelum 8 jam setelah panen. Namun untuk komoditi karet besarnya DDW memberikan informasi kelebihan penawaran dari sisi petani. Kondisi tersebut akan berdampak terhadap penekakan harga dari sisi permintaan (industri). Guna meningkatkan harga dari sisi petani, maka perlu ditambah industri pengolah, sehingga kekuatan tawar petani di pedesaan bisa meningkat.

Rendahnya harga karet di tingkat petani menyebabkan rendahnya pendapatan petani itu sendiri. Tentu saja akan berdampak terhadap jumlah uang beredar di pedesaan dan melemahkan daya beli masyarakat. Kondisi tersebut akan berdampak terhadap aktivitas ekonomi di pedesaan. Hasil analisis *multiplier effect* ekonomi di daerah pengembangan karet pada tahun 2014 menunjukkan sebesar 0,65. Setiap investasi Rp1 di pedesaan akan menimbulkan jumlah uang beredar pada periode berikut hanya Rp 0,65. Pada hal pada tahun 2010 indeks *multiplier effect* ekonomi di daerah sentra produksi karet 1,83. Menurunnya indeks

multiplier effect ekonomi memberikan gambaran bahwa usahatani karet menunjukkan perlambatan dibandingkan periode sebelumnya. Hal tersebut lebih disebabkan masyarakat pedesaan mulai bergeser usahatannya kekomoditi lain yakni kelapa sawit. Pada tahun yang indeks *multiplier effect* ekonomi di daerah pengembangan kelapa sawit mencapai 3,43 yang berarti setiap investasi Rp1 akan menyebabkan jumlah uang beredar pada periode berikutnya sebesar Rp 3.43. Di daerah pengembangan kelapa sawit petaninya lebih sejahtera karena meningkatnya jumlah uang beredar di pedesaan. Sementara di daerah pengembangan karet jumlah uang beredar relatif sedikit.

Hasil analisis DDW dan potensi pengembangan industri karet alam, maka indeks *multiplier effect* ekonomi dapat ditingkatkan melalui pembangunan industri karet. Pembangunan tersebut akan berdampak terhadap peningkatan daya saing petani karet. Dari sisi lain diperlukan penyuluhan kepada masyarakat pedesaan, bahwa tanaman karet perlu dipertahankan terutama untuk daerah yang kemiringan lahannya di atas 15%. Jika terjadi alih fungsi lahan dari kebun karet ke kelapa sawit terutama di daerah Riau bagian barat (tingkat kemiringan di atas 15%) akan berdampak terhadap bahaya erosi di bagian hulu.

Kesimpulan

1. Perkembangan sektor pertanian khususnya komoditi kelapa sawit di Daerah Riau telah menggeser usahatani komoditi karet alam. Komoditi kelapa sawit mempunyai potensi pasar yang terjamin, dari sisi lain petani karet menghadapi pasar monopsoni. Harga karet di tingkat petani sangat ditentukan oleh toke-toke desa. Petani karet tidak mempunyai kekuatan tawar menawar.
2. Perkebunan karet di Riau masih di kelola secara tradisional. Pengelolaannya dilakukan secara sederhana. Setelah bibit karet ditanam kemudian dibiarkan begitu saja tanpa perawatan yang memadai, sehingga tingkat produktivitasnya rendah, yaitu hanya sekitar 738 kg/ha/tahun. Kurangnya perawatan menyebabkan kualitas hasil bahan olah karet (Bokar) juga tergolong rendah. Budaya bokar kotor masih mendominasi perilaku petani karet dalam memproduksi bokar.
3. Daya dukung wilayah (DDW) usahatani karet alam sebesar 1,53. Artinya kemampuan wilayah menyediakan bahan baku industri lebih besar dari 1. Bahan baku yang tersedia melebihi kapasitas olah industri. Besarnya DDW memberikan informasi kelebihan penawaran dari sisi petani. Kondisi tersebut akan berdampak terhadap penekakan harga

- dari sisi permintaan (industri). Guna meningkatkan harga dari sisi petani, maka perlu ditambah industri pengolah, sehingga kekuatan tawar petani di pedesaan bisa meningkat.
4. Angka *multiplier effect* ekonomi di daerah pengembangan karet pada tahun 2014 menunjukkan sebesar 0,65. Setiap investasi Rp1 di pedesaan akan menimbulkan jumlah uang beredar pada periode berikut hanya Rp 0,65. Tahun 2010 indeks *multiplier effect* ekonomi di daerah sentra produksi karet 1,83. Menurunnya indeks *multiplier effect* ekonomi memberikan gambaran bahwa usahatani karet menunjukkan perlambatan dibandingkan periode sebelumnya. Hal tersebut lebih disebabkan masyarakat pedesaan mulai bergeser usahatani ke komoditi lain yakni kelapa sawit.

Daftar Pustaka

- Almasdi Syahza., 2005. Dampak Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Multiplier Effect Ekonomi Pedesaan di Daerah Riau, dalam *Jurnal Ekonomi*, Th. X/03/November/2005, PPD&I Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta.
- ., 2007a. Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan Berbasis Agribisnis di Daerah Riau, Penelitian Fundamental DP2M Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- ., 2007b. Percepatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan dengan Model Agroestate Berbasis Kelapa Sawit, dalam *Jurnal Ekonomi*, Th.XII/02/Juli/2007, PPD&I Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta.
- ., 2009a. Perumusan Model Pengetasan Kemiskinan Melalui Pemetaan Kelembagaan Ekonomi Berbasis Agribisnis di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Penelitian Strategis Nasional DP2M Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- ., 2013. Pemberdayaan Ekonomi Daerah Melalui Penataan Kelembagaan dan Pengembangan Industri Hilir Berbasis Kelapa Sawit, Penelitian MP3EI Tahun II, DP2M Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- ., 2015. *Strategi Percepatan Pembangunan Ekonomi Melalui Penataan Kelembagaan dan Industri Karet Alam di Propinsi Riau*, Penelitian MP3EI Tahun I, DP2M Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Gapkindo., 2014. *Laporan Tahunan*, Gabungan Pengusaha Karet Indonesia, Pekanbaru.
- Mustari. K. dan Mapangaja B., 2005. Analisis Daya Dukung Lingkungan untuk Melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Gowa, dalam *Jurnal Ecocelebica*, Vo. 1 No. 2, Januari 2005, hal 104-109.